



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 9781/KPTS/PK.240/F/08/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 6217/KPTS/PK/240/F/06/2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6217/KPTS/PK/240/F/06/2019 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (BEKERJA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi perubahan lokasi dan jumlah RTM, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6217/KPTS/PK/240/F/06/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6217/KPTS/PK/240/F/06/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6158);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05 /2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210 /8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;

12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017; Nomor 954/KMK.07/2017; Nomor 116 Tahun 2018; Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/KPTS/OT.050/M/1/2019 tentang Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Direktur Kesehatan Hewan Nomor: 31038/RC.110/F4/07/2019, tanggal 31 Juli 2019 Hal Revisi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bekerja 2019;
 2. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 02095/HK.160/F1/08/2019, tanggal 2 Agustus 2019 Hal Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6217/KPTS/PK/240/F/06/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 6217/KPTS/PK/240 /F/06/2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN (BEKERJA) DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2019.

PASAL I

1. Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6217/KPTS/PK/240/F/06/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 sebagai berikut:

BAB II PERENCANAAN, Huruf D KELUARAN yang semula:

D. KELUARAN

Terdistribusikannya paket bantuan di provinsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019. Tabel Lokasi Pelaksanaan dan Satker Pelaksana Kegiatan (Bekerja) Ditjen PKH 2019, sebagai berikut:

NO	PROVINSI	KABUPATEN	SATKER	RTM	UNGGAS (Ekor)
1	Sumut	Padang Lawas	BVet Medan	4.161	208.050
		Simalungun	BVet Medan	2.960	148.000
		Jumlah		7.121	356.00
2	Bengkulu	Kaur	BPTU-HPT Padang Mangatas	4.031	201.550
		Lebong	BPTU-HPT Padang Mangatas	3.151	157.550
		Jumlah		7.182	359.100
3	Sumbar	Pasaman	BPTU-HPT Padang Mangatas	5.930	296.500
		Pasaman Barat	BPTU-HPT Padang Mangatas	7.776	388.800
		Jumlah		13.706	685.300
4	Sumsel	Muara Enim	BVet Bukittinggi	4.134	206.700
		Ogan Komering Ilir	BVet Bukittinggi	5.906	295.300
		Jumlah		10.040	502.000
5	Kepri	Lingga	BVet Bukittinggi	417	20.850
6	Kalsel	Tanah Bumbu	BPTU-HPT Pelaihari	1.984	99.200
		Tapin	BPTU-HPT Pelaihari	1.743	87.150
		Tanah Laut	BPTU-HPT Pelaihari	1.780	89.000
		Balangan	BPTU-HPT Pelaihari	2.257	112.850
		Kotabaru	BPTU-HPT Pelaihari	1.426	71.300
		Hulu Sungai Utara	BPTU-HPT Pelaihari	3.823	191.150
		Kota Banjar baru	BPTU-HPT Pelaihari	903	45.150
		Jumlah		13.916	695.800
7	Banten	Lebak	BVet Subang	6.675	333.750
		Serang	BVet Subang	3.105	155.250
		Tangerang	BVet Subang	3.017	150.850
		Jumlah		12.797	639.850
8	Jateng	Blora	BVet Wates	9.953	497.650
		Kebumen	BVet Wates	9.369	468.450
		Klaten	BVet Wates	1.264	63.200
		Pemalang	BBPTU-HPT Baturraden	3.055	152.750
		Grobogan	BBPTU-HPT Baturraden	13.510	675.500
		Jumlah		37.151	1.857.550

9	Jatim	Probolinggo	BBIB Singosari	1.279	63.950
		Pemekasan	BBIB Singosari	12.417	620.850
		Bangkalan	BBIB Singosari	8.931	446.550
		Nganjuk	PUSVETMA	12.036	601.800
		Malang	PUSVETMA	5.229	261.450
		Jumlah			39.892
10	Sulsel	Enrekang	BIB Lembang	3.845	192.250
		Luwuutara	BIB Lembang	3.327	166.350
		Soppeng	BIB Lembang	2.739	136.950
		Sidenreng Rappang	BIB Lembang	3.386	169.300
		Pangkep	BIB Lembang	2.951	147.550
		Wajo	BBVetMaros	3.493	174.650
		Pinrang	BBVetMaros	3.604	180.200
		Maros	BBVetMaros	3.026	151.300
		Takalar	BBVetMaros	3.228	161.400
		Bone	BBVetMaros	3.767	188.350
		Jumlah			33.366
11	Sultra	Kolaka	BPTU-HPT Sapi Bali	1.415	70.750
		Buton	BPTU-HPT Sapi Bali	1.070	53.500
		Konawe Utara	BPTU-HPT Sapi Bali	934	46.700
		Konawe Selatan	BPTU-HPT Sapi Bali	2.375	118.750
		Wakatobi	BPTU-HPT Sapi Bali	1.330	66.500
		Buton Selatan	BPTU-HPT Sapi Bali	1.558	77.900
		Bombana	BPTU-HPT Sapi Bali	1.247	62.350
		Jumlah			9.929
12	Sulbar	Polewali Mandar	BVet Banjarbaru	6.113	305.650
		Majene	BVet Banjarbaru	2.888	144.400
		Mamuju	BVet Banjarbaru	4.432	221.600
		Mamuju Tengah	BVet Banjarbaru	1.200	60.000
		Mamuju Utara	BVet Banjarbaru	1.488	74.400
		Jumlah			16.121
13	Gorontalo	Gorontalo	BVet Denpasar	6.008	300.400
		Bualemo	BVet Denpasar	5.988	299.400
		Kota Gorontalo	BVet Denpasar	505	25.250
		Bone Bolango	BVet Denpasar	1.790	89.500
		Gorontalo Utara	BVet Denpasar	2.211	110.550
		Pohuwatu	BVet Denpasar	1.860	93.000
		Jumlah			18.362
Total				220.000	11.000.000

Diubah menjadi:

D. KELUARAN

Terdistribusikannya paket bantuan di provinsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019. Tabel Lokasi Pelaksanaan dan Satker Pelaksana Kegiatan (Bekerja) Ditjen PKH 2019, sebagai berikut:

NO	PROVINSI	KABUPATEN	SATKER	RTM	UNGGAS (Ekor)
1	Sumut	Padang Lawas	BVet Medan	4.037	201.850
		Simalungun	BVet Medan	2.960	148.000
		Jumlah		6.997	349.850
2	Bengkulu	Kaur	BPTU-HPT Padang Mangatas	3.231	161.550
		Lebong	BPTU-HPT Padang Mangatas	3.050	152.500
		Jumlah		6.281	314.050
3	Sumbar	Pasaman	BPTU-HPT Padang Mangatas	5.900	295.000
		Pasaman Barat	BPTU-HPT Padang Mangatas	4.521	226.050
		Jumlah		10.421	521.050
4	Sumsel	Muara Enim	BVet Bukittinggi	2.370	118.500
		Ogan Komering Ilir	BVet Bukittinggi	5.906	295.300
		Jumlah		8.276	413.800
5	Kalsel	Tanah Bumbu	BPTU-HPT Pelaihari	1.826	91.300
		Tapin	BPTU-HPT Pelaihari	1.710	85.500
		Tanah Laut	BPTU-HPT Pelaihari	1.780	89.000
		Balangan	BPTU-HPT Pelaihari	2.145	107.250
		Kotabaru	BPTU-HPT Pelaihari	980	49.000
		Hulu Sungai Utara	BPTU-HPT Pelaihari	3.823	191.150
		Kota Banjar baru	BPTU-HPT Pelaihari	817	40.850
		Jumlah		13.081	654.050

6	Banten	Lebak	BVet Subang	6.580	329.000		
		Serang	BVet Subang	3.055	152.750		
		Tangerang	BVet Subang	3.008	150.400		
		Jumlah		12.643	632.150		
7	Jateng	Blora	BVet Wates	9.953	497.650		
		Kebumen	BVet Wates	9.369	468.450		
		Klaten	BVet Wates	1.264	63.200		
		Pemalang	BBPTU-HPT Baturraden	3.055	152.750		
		Grobogan	BBPTU-HPT Baturraden	13.510	675.500		
		Jumlah		37.151	1.857.550		
8	Jatim	Probolinggo	BBIB Singosari	1.279	63.950		
		Pemekasan	BBIB Singosari	12.230	611.500		
		Bangkalan	BBIB Singosari	8.931	446.550		
		Nganjuk	PUSVETMA	12.036	601.800		
		Malang	PUSVETMA	5.229	261.450		
		Jumlah		39.705	1.985.250		
		9	Sulsel	Luwu Timur	BIB Lembang	2.213	110.650
Luwu Utara	BIB Lembang			3.327	166.350		
Soppeng	BIB Lembang			2.112	105.600		
Sidenreng Rappang	BIB Lembang			2.886	144.300		
Pangkep	BIB Lembang			5.160	258.000		
Wajo	BBVet Maros			3.284	164.200		
Pinrang	BBVet Maros			3.594	179.700		
Maros	BBVet Maros			2.026	101.300		
Takalar	BBVet Maros			2.228	111.400		
Kepulauan Selayar	BBVet Maros			2.000	100.000		
Bone	BBVet Maros			3.767	188.350		
Jumlah				32.597	1.629.850		
10	Sultra			Kolaka	BPTU-HPT Sapi Bali	1.415	70.750
				Buton	BPTU-HPT Sapi Bali	1.070	53.500
		Konawe Utara	BPTU-HPT Sapi Bali	934	46.700		
		Konawe Selatan	BPTU-HPT Sapi Bali	2.375	118.750		
		Wakatobi	BPTU-HPT Sapi Bali	1.330	66.500		
		Buton Selatan	BPTU-HPT Sapi Bali	1.558	77.900		
		Bombana	BPTU-HPT Sapi Bali	1.247	62.350		
		Jumlah		9.929	496.450		
11	Sulbar	Polewali Mandar	BVet Banjarbaru	6.062	303.100		
		Majene	BVet Banjarbaru	2.851	142.550		
		Mamuju	BVet Banjarbaru	4.432	221.600		
		Mamuju Tengah	BVet Banjarbaru	1.200	60.000		
		Mamuju Utara	BVet Banjarbaru	1.473	73.650		
		Jumlah		16.018	800.900		

12	Gorontalo	Gorontalo	BVet Denpasar	5.360	268.000
		Bualemo	BVet Denpasar	4.816	240.800
		Kota Gorontalo	BVet Denpasar	469	23.450
		Bone Bolango	BVet Denpasar	1.481	74.050
		Gorontalo Utara	BVet Denpasar	2.191	109.550
		Pohuwatu	BVet Denpasar	1.711	85.550
		Jumlah			16.028
Total			209.127	10.456.350	

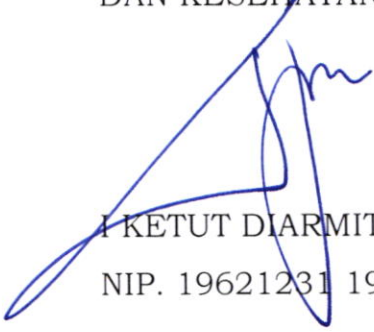
2. Ketentuan lain dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6217/KPTS /PK/240/F/06/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019, dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,


KETUT DIARMITA
NIP. 19621231 198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian